RABU, 23 JANUARI 2019

Sujarwanto Doktor Ke-42 Pemprov Jateng

SEMARANG - Batas minimal kawasan industri (KI) seluas 50 hektare perlu ditinjau kembali. Idealnya, kawasan itu dibangun di atas lahan sekitar 300 hektare supaya pemanfaatan lahan bisa dioptimalkan. Bukan hanya industri, pengembangan kawasan juga perlu menyentuh area terbuka hijau, kluster industri kecil dan menengah, serta pembangunan jalan dan drainase. Demikian diungkapkan Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng dalam ujian disertasi Program Studi Doktor Administrasi Publik di Gedung B Pascasarjana Undip, Selasa (22/1).

"Kawasan industri hendaknya tumbuh berfungsi sebagai pengembangan dan pemerataan. Jika lahannya 50 hektare tentu hanya untuk kawasan industri, kesiapan lahan paling ideal 300 hektare," jelas Sujarwanto saat mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang diketuai Dr Hardi Warsono MTP itu.

Menurutnya, negara perlu hadir dalam pembangunan KI dan dimulai membuat tata perencanaan yang baik. Industri tumbuh lebih baik ketika berada di dalam KI. Jika berada di luar kawasan, akan menyebabkan masalah pencemaran lingkungan, tata ruang tidak baik, dan masalah sosial ekonomi lain.

Sebagian besar industri tumbuh di luar KI, penyebabnya ketersediaan kawasan dan minat investor rendah. Manajemen kawasan industri terbagi tiga tipologi utama, yakni pengembang, penyedia lahan, dan pelengkap pengembang wilayah perkotaan.

Jateng punya sembilan KI, yakni Tugu Wijayakusuma, Candi Industrial Park, Bukit Semarang Baru (BSB), Terboyo, Lingkungan Industri Kecil (LIK), Tanjung Emas di Semarang, Kendal, Sayung Jatengland di Demak, dan di Cilacap. Adapun KI Jababeka dijadikan rujukan dalam penelitiannya.

"Model Jababeka ini mengubah kawasan yang tidak bernilai dan lokasinya di pinggiran menjadi kota bercirikan industri. Keberadaannya memangkas ketimpangan daerah pinggiran dengan Kota Jakarta," tandasnya.

Atas disertasinya itu, Sujarwanto dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan. Eks penjabat Bupati Semarang itu menjalani studi program doktoral selama enam tahun dan 10 bulan dengan nilai rata-rata kumulatif 3,75.

"Selaku promotor, saya ikut tegang saat ujian ini. Dari hasil ujian, promovendus ternyata memang layak jadi doktor," kata promotor Prof Dr Sri Suwitri MSi. (J17-40)

SM/Royce Wijaya SP

LULUS DOKTOR : *Kepala Bappeda Jateng Sujarwanto Dwiatmoko (paling kiri) dinyatakan lulus program doktor Administrasi Publik mendapatkan selamat dari Ketua Tim Penguji Hardi Warsono, di gedung Pascasarjana Undip, Selasa (21/1). (40)*